

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015-2019
PADA PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN OKU PROVINSI
SUMATERA SELATAN (Studi Kasus BKAD OKU)**

Dina Apriyani Ode¹

odedinaapriyani@gmail.com

Program Studi Akuntansi Universitas Baturaja

Mardiah Kenamon²

kenamonmardiah@gmail.com

Program Studi Akuntansi Universitas Baturaja

Abstract

This study aims to determine the effect of the application of Government Accounting Standards on the quality of the 2015-2019 Financial Statements at the Regional Government of Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra Province. This type of research is quantitative descriptive research. This study uses population research because the subject is less than 100 as many as 65 people. The data used are primary. The data analysis technique used is a simple linear regression test. The results showed that the application of Government Accounting Standards had a significant effect on the quality of the Financial Statements of Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra Province. The value of the coefficient of determination (Adjusted R²) is 0.344, which means that the variation of changes in the dependent variable can be explained by the independent variable by 34.4% and the remaining 65.6% can be explained by other variables not examined. The limitation of this research is that it was only conducted in one SKPD in OKU Regency, South Sumatra Province. The contribution of this research is expected to be useful for the Regional Government, especially Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra Province as a reference to further improve the quality of Regional Government Financial Reports and following applicable Government Accounting Standards.

Keywords: *Implementation of Government Accounting Standards, Quality of Local Government Financial Reports.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun

dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyusunan SAP Berbasis Akrua dilakukan oleh KSAP melalui proses baku Penyusunan (*due process*). Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Penyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis Akrua dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para

pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh (IKAPI, 2011 : 07).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, suatu pemerintahan yang telah menerapkan SAP yang baik dan konsisten akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Dwitayanti, 2019 : 1). Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu menerapkan akuntansi berbasis akrual pertama kali pada tahun 2015, yang sebelumnya menerapkan akuntansi berbasis kas. Ini sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara umum laporan keuangan meliputi ikhtisar-ikhtisar yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas serta perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam satu periode waktu tertentu. Tiap ikhtisar tersebut dibuat dalam satu format sendiri secara terpisah. Ikhtisar posisi keuangan tercermin dalam laporan keuangan yang disebut neraca. Laporan ini mengikhtisarkan status atau posisi sumber daya pada suatu saat tertentu. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal/ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Tiap laporan keuangan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu kepada para pemangku kepentingan. Para pemakai laporan keuangan selanjutnya dapat menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam memilih alternatif penggunaan

sumber daya perusahaan yang terbatas (Samryn, 2017 : 30).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun dengan berpedoman pada SAP. LKPD yang berkualitas seperti berikut: “Harus memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yakni: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami, dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan berarti pemerintah daerah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat/TMP, (PP No.24 Tahun 2005)”.
Hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan (BPK) tahun anggaran 2013 - 2019 atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pada tahun 2013 LKPD kabupaten OKU mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), setahun kemudian tepatnya pada tahun 2014 LKPD kabupaten OKU masih tetap mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) karena belum memadainya pengelolaan persediaan, aset tetap dan aset lainnya. Tahun 2015 pemerintah kabupaten OKU mulai melakukan pembenahan dengan cara Komitmen pimpinan, menyiapkan anggaran, rancangan sistem pengendalian internal, perbaikan sistem akuntansi keuangan serta sistem informasi manajemen barang daerah, peningkatan sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi. Dalam menyusun laporan keuangan dan hasil dari pembenahan itu ialah membaiknya opini audit atas LKPD kabupaten OKU, ditahun 2015 LKPD kabupaten OKU mendapat

opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sampai tahun 2019 pemerintah kabupaten OKU mencetak prestasi yaitu mendapat opini wajar tanpa pengecualian sebanyak lima kali berturut turut.” (BKAD OKU, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian Triwardana (2017); Oktarina dkk (2016); Herawati dan Nopianti (2017), bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah diterapkan di lingkup pemerintah, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah. Hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan. Hubungan yang menyatakan bahwa adanya Pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik sehingga

menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan.”.

Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Bastian (2010:137-138) Pada tahun 2005, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Terlepas dari kontroversi dan kelemahan yang sangat mendasar. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD disusun serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen, yang ditetapkan melalui keputusan

presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Keputusan Presiden tersebut menguatkan kedudukan KSAP yang telah dibentuk oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 308/KMK.012/2002 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah tertanggal 13 Juni 2012.

KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Kerja). Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Muatan Isi Masing-Masing SAP

- a. SAP No 01 – Penyajian Laporan Keuangan.
- b. SAP No 02 – Laporan Realisasi Anggaran.
- c. SAP No 03 – Laporan Arus Kas.

- d. SAP No 04 – Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- e. SAP No 05 – Akuntansi Persediaan.
- f. SAP No 06 – Akuntansi Investasi.
- g. SAP No 07 – Akuntansi Aset Tetap.
- h. SAP No 08 – Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan.
- i. SAP No 09 – Akuntansi Kewajiban.
- j. SAP No 10 – Akuntansi untuk Koreksi Kesalahan Mendasar, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa.
- k. SAP No 11 – Akuntansi Khusus Untuk Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016:02) Salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari pemangku kekuasaan. Istilah lain dari akuntabilitas tersebut “amanah” yang berarti pemangku kekuasaan yang akuntabel atau amanah adalah mereka yang terpercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang

dipercayakan kepadanya. Setiap Rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan.

Dalam masyarakat yang maju peradabannya, pertanggungjawaban tersebut tidak cukup dengan laporan lisan saja, namun perlu di dukung dengan laporan pertanggungjawaban secara tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai.

Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya, Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu :

1. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit

kerja di dalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemerintah daerah dan DPRD.

2. Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*eksternal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai (*disclosure*) mengenai

informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secarik laporan keuangan publikasian yang terdapat dikoran atau situs pemerintah daerah pada dasarnya mengandung informasi yang sangat berarti jika dilakukan analisis secara lebih seksama. Laporan keuangan publikasian merupakan inti sari dari data keuangan organisasi yang sudah diringkas, diklasifikasikan, dan dikelompokkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu organisasi apakah tergolong sehat atau sakit, kita dapat melihatnya dari laporan keuangannya (Mahmudi, 2016:04)

Adapun secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah :

1. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik;
2. Untuk alat akuntabilitas publik;
3. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Tujuan Laporan Keuangan Menurut SAP

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah. Tujuan pelaporan keuangan tersebut adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016:06) jika laporan keuangan publikasian itu dieksplorasikan dan ditelaah secara kritis, maka pembaca laporan akan dapat menangkap berbagai informasi penting di dalamnya. Secara spesifik, manfaat penyajian laporan keuangan adalah:

- 1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitasnya;
- 2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi;
- 3. Memberikan informasi keuangan untuk monitor kinerja,

kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;

- 4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran;
- 5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:
 - a. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain;
 - b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di pemerintahan;
 - c. Untuk mengevaluasi hasil (outcome) suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target;
 - d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan (*equity & equality*).

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah harus berupaya memperbaiki kualitatif laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut:

1. Relevan (*relevance*) artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Relevansi laporan keuangan terkait dengan:
 - a. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi, yaitu memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa datang.
 - b. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang.
 - c. Laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu. Laporan keuangan yang baik harus disajikan tepat waktu,

sebab nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan.

2. Andal (*Reliability*) artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Laporan keuangan yang andal memiliki ciri berikut:
 - a. Disajikan secara jujur, yaitu laporan keuangan terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.
 - b. Dapat diverifikasi, yaitu penyajian laporan keuangan dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit laporan keuangan.
 - c. Netral dalam penyajian, yaitu penyajian laporan keuangan tidak bersifat tendensius dan bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.
3. Dapat dibandingkan (*comparability*) artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding kinerja masa lalu atau pembanding kinerja organisasi lain yang sejenis.
4. Dapat dipahami (*understandability*) artinya

laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

Penelitian Sebelumnya

Triwardana (2017), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

Oktarina, dkk (2016), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang”. Hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas aparatur Pemerintah Daerah, dan

good governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di kota Semarang.

Herawati dan Nopianti (2017), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Good Governance memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sako dan Lantowa (2018), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

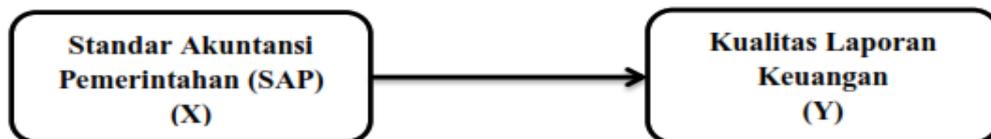
penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo.

Dwitayanti (2019), melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Banyuasin”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Kerangka Pemikiran

Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah Standar Akuntansi Pemerintah (X), sedangkan variabel dependent adalah Kualitas Laporan Keuangan (Y), maka dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga ada pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan penelitian populasi karena subjek kurang dari 100, populasi yang digunakan adalah seluruh pegawai di kantor BKAD kabupaten OKU yaitu sebanyak 65 orang. (Sugiyono, 2015:215). Data yang digunakan adalah data primer. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Uji Regresi linier sederhana (Kuncoro, 2013:148). Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Aset Daerah

Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan dengan melakukan penyebaran kuesioner pada seluruh pegawai yang menjadi sampel (Basuki dan Prawoto, 2017: 74). Kuesioner dalam penelitian menggunakan Skala Likert (Sugiyono, 2015: 93-94).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis pengujian dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan uji Reliabilitas.

Uji Validitas Data

Tabel Penerapan Standar Akuntansi Pemeintah

Uji Validitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Item	Rhitung	rtabel	Keterangan
PSAP1	0,346	0,244	Valid
PSAP2	0,824	0,244	Valid
PSAP3	0,378	0,244	Valid
PSAP4	0,454	0,244	Valid
PSAP5	0,548	0,244	Valid
PSAP6	0,278	0,244	Valid
PSAP7	0,560	0,244	Valid
PSAP8	0,799	0,244	Valid
PSAP9	0,466	0,244	Valid
PSAP10	0,824	0,244	Valid
PSAP11	0,512	0,244	Valid

Sumber: data primer diolah, 2021

Dari hasil pengujian validitas pada tabel 1, kuesioner yang berisi 11 pernyataan yang telah diisi oleh 65 responden pada penelitian ini. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel diatas menunjukkan variabel standar akuntansi pemerintah mempunyai kriteria valid untuk semua item pernyataan dengan nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Tabel 2 Kualitas Laporan Keuangan

Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan

Item	Rhitung	rtabel	Keterangan
KLK1	0,364	0,244	Valid
KLK2	0,504	0,244	Valid
KLK3	0,264	0,244	Valid
KLK4	0,519	0,244	Valid
KLK5	0,645	0,244	Valid
KLK6	0,429	0,244	Valid
KLK7	0,514	0,244	Valid
KLK8	0,432	0,244	Valid

Sumber: data primer diolah, 2021

Dari hasil pengujian validitas pada tabel 2, hasil perhitungan validitas pada tabel 2 diatas menunjukkan variabel standar akuntansi pemerintah mempunyai kriteria valid untuk semua item pernyataan dengan nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel maka butir pernyataan tersebut valid.

Uji Reabilitas

Tabel 3
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.858	11

Sumber: data primer diolah, 2021

Peneliti menggunakan koefisien cronbachalpa (α). Disini peneliti menggunakan SPSS untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel jika $\alpha > 0,80$ (Basuki dan Prawito, 2016:78). Dari hasil uji reliabilitas pada variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X) dapat dilihat pada tabel 3 menunjukkan nilai Cronbach's alpha $0,858 > 0,80$ maka variable penerapan standar akuntansi pemerintah reliabel atau dapat dipercaya.

Tabel 4
Kualitas Laporan Keuangan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.762	8

Sumber: Data primer diolah, 2021

Dari hasil uji reliabilitas pada variabel Kualitas Laporan keuangan (Y) dapat dilihat pada tabel 4

menunjukkan nilai Cronbach's alpha $0,762 > 0,80$ maka variabel penerapan standar akuntansi pemerintah reliabel atau dapat dipercaya.

Tabel 5

Analisis Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	
		B	Std. Error	Beta		t
1	(Constant)	10,487	2,152		4,874	,000
	penerapan standar akuntansi X	,415	,072	,587	5,750	,000

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan Y

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan output pada tabel 5 persamaan regresi linier sederhana antara Penerapan Standar Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dituliskan sebagai berikut:

$$Y' = 10,487 + 0,415 + 2,512$$

Keterangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 10,487 menunjukkan bahwa jika variabel independen (penerapan standar akuntansi pemerintah) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y

(kualitas laporan keuangan) sebesar 10,487.

2. Nilai koefisien regresi penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 0,415 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% penerapan standar akuntansi pemerintah maka akan meningkat sebesar 0,415.
3. Error dalam penelitian ini adalah sebesar 2,152 yang berarti bahwa populasi penelitian (pegawai BKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu) terdapat selisih antara nilai duga dengan nilai hasil pengamatan sebesar 2,152.

Tabel 6

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,587 ^a	,344	,334	3,606920
a. Predictors: (Constant), penerapan standar akuntansi X				
b. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan Y				

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 6 maka diketahui nilai R Square 0,344 atau 34,4% variasi kualitas laporan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabelindependen yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, sedangkan sisanya (100% - 34,4% = 65,6%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti (Priyatno, 2017 : 160).

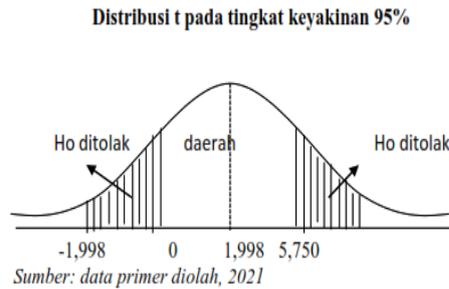
Tabel 7

Uji t (Parstia)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,487	2,152		4,874	,000
	penerapan standar akuntansi X	,415	,072	,587	5,750	,000

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan Y

Sumber: data primer diolah, 2021



Gambar 2

Nilai t-tabel dilihat dari t dengan rumus $df = n-k-1$, dengan $\alpha = 5\%$ dimana adalah jumlah pengamatan dan k adalah jumlah variabel sehingga $df = 65-2-1 = 62$ dengan $\alpha=5\%$, maka diperoleh t-tabel 1,998, berdasarkan keterangan pada tabel 7 maka dapat dinyatakan bahwa t-hitung sebagai berikut: Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah di ketahui bahwa t-hitung 5,750 dan nilai sig 0,000 dan t-tabel sebesar 1,998, dengan kriteria t-hitung > t-tabel maka H_a diterima. Jadi didapat $5,750 > 1,998$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_a diterima artinya standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar 2.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yaitu bahwa

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Artinya semakin baik Penerapan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu maka semakin memberikan pengaruh yang positif pola terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah yang dihasilkan. Hal ini dapat di buktikan dari perolehan t-hitung sebesar 5,750 > ttabel sebesar 1,998.

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dikatakan Relevan (relevance) karena informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan

Komerling Ulu dikatakan Andal (*Reliability*) sebab informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komerling Ulu dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan tidak mengandung unsur manipulasi. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komerling Ulu dikatakan dapat dibandingkan (*comparability*) karena Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komerling Ulu dapat digunakan sebagai pembandingan kinerja masa lalu atau pembandingan kinerja organisasi lain yang sejenis. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komerling Ulu dikatakan dapat dipahami (*understandability*) karena Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komerling Ulu dikatakan telah memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian,

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Oktarina dkk (2016), Triwardana (2017), Herawati dan Nopianti (2017), Sako dan Lantowa (2018), Dwitayanti (2019) yang menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan artinya semakin diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintah yang baik maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas Laporan Keuangannya.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial atau uji t bahwa variabel X_1 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah) dengan menggunakan regresi linier sederhana bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2. R square menunjukkan bahwa besarnya persentase sumbangan pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 34,4% sedangkan sisanya sebesar 65,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini, hanya dilakukan pada satu SKPD di Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan. Untuk penelitian selanjutnya dengan menambah variabel lain seperti Kompetensi Sumber Daya Manusia atau area penelitian dapat diperluas, tidak hanya pada satu SKPD namun dapat menambah SKPD lainnya.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan sebagai referensi dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Jakarta
- Basuki, A.T. & Prawito, N. 2016. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Dwitayanti, Y. 2019. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Akuntanika*, Vol. 5, No. 1
- Herawati, T & Nopianti, D. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *STAR – Study & Accounting Research*, Vol. XIV No. 2
- IKAPI, K. 2011. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Fokusmedia. Bandung
- Kuncoro. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi 4. Erlangga.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu

- Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Oktarina, M. Raharjo, & K. Andini, R, 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan *Good governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014). *Journal Of Accounting*, Vol. 2, No. 2
- Priyatno, Duwi. 2017. *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*. Andi. Yogyakarta
- Sako, U. & Lantowo, D. F. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal Of Accounting Science*, Vol. 2 No. 1
- Samryn. 2017. *Pengantar Akuntansi*. Edisi 1. IFRS. Depok
- Sugiyono. 2015. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. Sumber: <https://bkad.okukab.go.id>
- Triwardana, D. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). *JOM Fekon*, Vol. 4 No.